



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.376, 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM. Gedung Kantor  
KPU. Standardisasi. Pedoman.

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**NOMOR 04 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEDOMAN STANDAR GEDUNG KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM,  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA, DAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN/KOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Independen Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dilakukan penataan prasarana dan sarana kerja;
  - b. bahwa prasarana dan sarana kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Independen Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemilihan

Umum di daerah, sehingga diperlukan pedoman standar prasarana dan sarana kerja;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Standar Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 20 Mei 2011

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN STANDAR GEDUNG KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pedoman standar gedung kantor Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Independen Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota adalah pembakuan gedung kantor, dan perlengkapan kantor.

2. Gedung kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika.
3. Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Independen Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU Provinsi, KIP Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan KIP Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
6. Identitas Gedung Kantor KPU, KPU Provinsi, KIP Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan KIP Kabupaten/Kota adalah ciri khas bangunan gedung KPU, KPU Provinsi, KIP Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan KIP Kabupaten/Kota berupa bentuk bangunan tertentu dengan Logo KPU disertai warna bangunan tertentu.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN PEDOMAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud dari Pedoman Standar Gedung Kantor KPU, KPU Provinsi, KIP Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan KIP Kabupaten/Kota agar penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung Komisi Pemilihan Umum, dapat dilaksanakan secara tertib, efektif dan efisien.
- (2) Tujuan dari Pedoman Standar Gedung Kantor KPU, KPU Provinsi, KIP Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, KIP Kabupaten/Kota agar pembangunan Gedung KPU, KPU Provinsi, KIP Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, efisien dalam penggunaan sumber daya, serasi dan selaras dengan lingkungannya.

**BAB III****STANDAR GEDUNG KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA****BAGIAN KESATU****Pasal 3****KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM**

- (1) Kantor Komisi Pemilihan Umum berkedudukan di ibu kota negara.
- (2) Kantor Komisi Pemilihan Umum dapat menampung sekurang kurangnya 670 karyawan.
- (3) Gedung kantor Komisi Pemilihan Umum terdiri dari:
  - a. Ruang Ketua KPU dan ruang Sekretaris Jenderal KPU dengan luas total masing-masing 147 m<sup>2</sup>, terdiri dari:
    - 1) Ruang Kerja dengan luas 16 m<sup>2</sup>;
    - 2) Ruang Tamu dengan luas 14 m<sup>2</sup>;
    - 3) Ruang Rapat dengan luas 60 m<sup>2</sup>;
    - 4) Ruang Staf dengan luas 20 m<sup>2</sup>;
    - 5) Ruang Tunggu dengan luas 18 m<sup>2</sup>;
    - 6) Ruang Arsip dengan luas 5 m<sup>2</sup>;
    - 7) Ruang Istirahat dengan luas 10 m<sup>2</sup>; dan
    - 8) Ruang Toilet dengan luas 4 m<sup>2</sup>.
  - b. Ruang 6 Anggota KPU dan Ruang Wakil Sekretaris Jenderal dengan total luas masing – masing 88 m<sup>2</sup>, terdiri dari :
    - 1) Ruang Kerja dengan luas 16 m<sup>2</sup>;
    - 2) Ruang Tamu dengan luas 14 m<sup>2</sup>;
    - 3) Ruang Rapat dengan luas 30 m<sup>2</sup>;
    - 4) Ruang Staf dengan luas 9 m<sup>2</sup>;
    - 5) Ruang Arsip dengan luas 5 m<sup>2</sup>;
    - 6) Ruang Istirahat dengan luas 10 m<sup>2</sup>; dan
    - 7) Ruang Toilet dengan luas 4 m<sup>2</sup>.

- c. Ruang Kepala Biro, terdiri dari :
  - 1) Ruang Kerja dengan luas 14 m<sup>2</sup>;
  - 2) Ruang Tamu dengan luas 12 m<sup>2</sup>;
  - 3) Ruang Rapat dengan luas 30 m<sup>2</sup>;
  - 4) Ruang Staff dengan luas 10 m<sup>2</sup>;
  - 5) Ruang Tunggu dengan luas 12 m<sup>2</sup>;
  - 6) Ruang Arsip dengan luas 3 m<sup>2</sup>;
  - 7) Ruang Istirahat dengan luas 9 m<sup>2</sup>; dan
  - 8) Ruang Toilet dengan luas 3 m<sup>2</sup>.
- d. Ruang Kepala Bagian, terdiri dari:
  - 1) Ruang Kerja dengan luas 12 m<sup>2</sup>;
  - 2) Ruang Tamu dengan luas 6 m<sup>2</sup>.
- e. Ruang Kepala Sub Bagian, terdiri dari:
  - 1) Ruang Kerja dengan luas 8 m<sup>2</sup>;
  - 2) Ruang Arsip dengan luas 2 m<sup>2</sup>.
- f. Ruang Staff terdiri dari:
  - 1) Ruang Kerja dengan luas 3 m<sup>2</sup>;
  - 2) Ruang Arsip dengan luas 1 m<sup>2</sup>.
- g. Ruang Kerja untuk Tenaga Profesional dengan luas 12 m<sup>2</sup>;
- h. Ruang Rapat Pleno dengan luas ruangan 800 m<sup>2</sup>;
- i. Gudang atau Ruang Arsip dengan luas 60 m<sup>2</sup>;
- j. Gudang Induk atau Ruang Arsip sebanyak 2 ruang dengan luas masing-masing 150 m<sup>2</sup>;
- k. Ruang Data Center sebanyak 2 ruang dengan luas masing-masing 50 m<sup>2</sup>;
- l. Ruang Media Center dengan luas 120 m<sup>2</sup>;
- m. Ruang Confrence Press dengan luas 120 m<sup>2</sup>;
- n. Ruang Perpustakaan dengan luas 120 m<sup>2</sup>;
- o. Ruang Pendidikan Pemilih dengan luas 120 m<sup>2</sup>;
- p. Ruang LPSE/ULP dengan luas 60 m<sup>2</sup>;

- q. 30% x luas (sebagai selasar, toilet dan mushola dan lain-lain) dengan luas 428 m<sup>2</sup>.
- (4) Luas tanah Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum minimal 7000 m<sup>2</sup>.
- (5) Bangunan gedung kantor Komisi Pemilihan Umum dilengkapi dengan bangunan pagar yang disesuaikan dengan kondisi dan lokasi bangunan.

## BAGIAN KEDUA

### Pasal 4

#### KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN PROVINSI

- (1) Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Independen Pemilihan Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
- (2) Tipe Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Independen Pemilihan Provinsi sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan KPU ini.
- (3) Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Independen Pemilihan Provinsi dapat menampung sekurang kurangnya 51 karyawan.
- (4) Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Independen Pemilihan Provinsi terdiri dari Tipe I, Tipe II, Tipe III dan Tipe IV.
- a. Tipe I terdiri dari :
- 1) Ruang Ketua KPU dan Ruang Sekretaris KPU Provinsi dan KIP Provinsi dengan luas total masing – masing 43 m<sup>2</sup>, terdiri dari:
    - a) Ruang Kerja dengan luas 14 m<sup>2</sup>;
    - b) Ruang Tamu dengan luas 12 m<sup>2</sup>;
    - c) Ruang Rapat dengan luas 14 m<sup>2</sup>; dan
    - d) Ruang Toilet dengan luas 3 m<sup>2</sup>.
  - 2) Ruang Kerja Anggota dan KPU dan anggota KIP dengan luas masing-masing 14 m<sup>2</sup>;
  - 3) Ruang Kerja Kepala Bagian dengan luas masing-masing 12 m<sup>2</sup>;
  - 4) Ruang Kerja Sub Bagian dengan luas masing-masing 12 m<sup>2</sup>;
  - 5) Ruang Kerja Staff dengan luas masing-masing 3 m<sup>2</sup> dan Ruang Arsip 1 m<sup>2</sup>;
  - 6) Ruang Kerja Tenaga Profesional dengan luas 12 m<sup>2</sup>;



- 7) Ruang Rapat Pleno dengan luas 160 m<sup>2</sup>;
  - 8) Gudang atau Ruang Arsip dengan luas masing-masing 50 m<sup>2</sup>;
  - 9) Ruang Data Center dengan luas masing-masing 6 m<sup>2</sup>;
  - 10) Ruang Media Center dengan luas 50 m<sup>2</sup>;
  - 11) Ruang Perpustakaan dan Ruang LPSE dengan luas 50 m<sup>2</sup>;
  - 12) 40% x luas (sebagai selasar, toilet dan mushola dan lain-lain) dengan luas 133 m<sup>2</sup>.
- b. Tipe II terdiri dari :
- 1) Ruang Ketua Komisioner dan Ruang Sekretaris dengan luas total masing – masing 43 m<sup>2</sup>, terdiri dari:
    - a) Ruang Kerja dengan luas 14 m<sup>2</sup>;
    - b) Ruang Tamu dengan luas 12 m<sup>2</sup>;
    - c) Ruang Rapat dengan luas 14 m<sup>2</sup>; dan
    - d) Ruang Toilet dengan luas 3 m<sup>2</sup>.
  - 2) Ruang Kerja Anggota KPU Provinsi dan anggota KIP Provinsi dengan luas 14m<sup>2</sup>;
  - 3) Ruang Kerja Kepala Bagian dengan luas 12 m<sup>2</sup>;
  - 4) Ruang Kerja Sub Bagian dengan luas 12 m<sup>2</sup>;
  - 5) Ruang Kerja Staff dengan luas 3 m<sup>2</sup> dan Ruang Arsip 1 m<sup>2</sup>;
  - 6) Ruang Kerja Tenaga Profesional dengan luas 12 m<sup>2</sup>;
  - 7) Ruang Rapat Pleno dengan luas 160 m<sup>2</sup>;
  - 8) Gudang atau Ruang Arsip dengan luas 50 m<sup>2</sup>;
  - 9) Ruang Data Center dengan luas 6 m<sup>2</sup>;
  - 10) Ruang Media Center dengan luas 50 m<sup>2</sup>;
  - 11) Ruang Perpustakaan dan Ruang LPSE dengan luas 50 m<sup>2</sup>;
  - 12) 35% x luas (sebagai selasar, toilet dan mushola dan lain-lain) dengan luas 117 m<sup>2</sup>.
- c. Tipe III terdiri dari :
- 1) Ruang Ketua Komisioner dan Ruang Sekretaris dengan luas total masing – masing 43 m<sup>2</sup>, terdiri dari:

- a) Ruang Kerja dengan luas 14 m<sup>2</sup>;
  - b) Ruang Tamu dengan luas 12 m<sup>2</sup>;
  - c) Ruang Rapat dengan luas 14 m<sup>2</sup>; dan
  - d) Ruang Toilet dengan luas 3 m<sup>2</sup>.
- 2) Ruang Kerja Anggota KPU Provinsi dan anggota KIP Provinsi dengan luas 14m<sup>2</sup>;
  - 3) Ruang Kerja Kepala Bagian dengan luas 12 m<sup>2</sup>;
  - 4) Ruang Kerja Sub Bagian dengan luas 12 m<sup>2</sup>;
  - 5) Ruang Kerja Staff dengan luas 3 m<sup>2</sup> dan Ruang Arsip 1 m<sup>2</sup>;
  - 6) Ruang Kerja Tenaga Profesional dengan luas 12 m<sup>2</sup>;
  - 7) Ruang Rapat Pleno dengan luas 160 m<sup>2</sup>;
  - 8) Gudang atau Ruang Arsip dengan luas 50 m<sup>2</sup>;
  - 9) Ruang Data Center dengan luas 6 m<sup>2</sup>;
  - 10) Ruang Media Center dengan luas 50 m<sup>2</sup>;
  - 11) Ruang Perpustakaan dan Ruang LPSE dengan luas 50 m<sup>2</sup>;
  - 12) 30% x luas (sebagai selasar,toilet dan mushola dan lain-lain) dengan luas 100 m<sup>2</sup>.
- d. Tipe IV terdiri dari :
- 1) Ruang Ketua Komisioner dan Ruang Sekretaris dengan luas total masing – masing 43 m<sup>2</sup>, terdiri dari:
    - a) Ruang Kerja dengan luas 14 m<sup>2</sup>;
    - b) Ruang Tamu dengan luas 12 m<sup>2</sup>;
    - c) Ruang Rapat dengan luas 14 m<sup>2</sup>; dan
    - d) Ruang Toilet dengan luas 3 m<sup>2</sup>.
  - 2) Ruang Kerja Anggota KPU Provinsi dan anggota KIP Provinsi dengan luas 14 m<sup>2</sup>;
  - 3) Ruang Kerja Kepala Bagian dengan luas 12 m<sup>2</sup>;
  - 4) Ruang Kerja Sub Bagian dengan luas 12 m<sup>2</sup>;
  - 5) Ruang Kerja Staff dengan luas 3 m<sup>2</sup> dan Ruang Arsip 1 m<sup>2</sup>;
  - 6) Ruang Kerja Tenaga Profesional dengan luas 12 m<sup>2</sup>;

- 7) Ruang Rapat Pleno dengan luas 160 m<sup>2</sup>;
  - 8) Gudang atau Ruang Arsip dengan luas 50 m<sup>2</sup>;
  - 9) Ruang Data Center dengan luas 6 m<sup>2</sup>;
  - 10) Ruang Media Center dengan luas 50 m<sup>2</sup>;
  - 11) Ruang Perpustakaan dan Ruang LPSE dengan luas 50 m<sup>2</sup>;
  - 12) 25% x luas (sebagai selasar, toilet dan mushola dan lain-lain) dengan luas 83 m<sup>2</sup>.
- (5) Luas tanah Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Tipe I, Tipe II, Tipe III dan Tipe IV minimal 1.200 m<sup>2</sup> maksimal 2 kali luas lahan tersebut.
- (6) Bangunan gedung kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Independen Pemilihan Provinsi dilengkapi dengan bangunan pagar yang disesuaikan dengan kondisi dan lokasi bangunan.

### BAGIAN KETIGA

#### Pasal 5

#### KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA

- (1) Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota.
- (2) Tipe Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana terlampir dengan Lampiran Peraturan KPU ini.
- (3) Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dapat menampung minimal 39 karyawan.
- (4) Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota terdiri dari Tipe I, Tipe II, Tipe III dan Tipe IV.
  - a. Tipe I terdiri dari :
    - 1) Ruang Kerja KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota dan Ruang Kerja Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota dengan luas masing – masing 14 m<sup>2</sup>;
    - 2) Ruang Kerja Sub Bagian dengan luas masing-masing 12 m<sup>2</sup>;
    - 3) Ruang Kerja Staff dengan luas masing-masing 3 m<sup>2</sup> dan Ruang Arsip 1 m<sup>2</sup>;

- 4) Ruang Rapat Pleno dengan luas 96 m<sup>2</sup>;
  - 5) Gudang atau Ruang Arsip dengan luas masing-masing 30 m<sup>2</sup>;
  - 6) Gudang induk dengan luas 60 m<sup>2</sup>;
  - 7) Ruang Data Center dengan luas 6 m<sup>2</sup>;
  - 8) Ruang Media Center dan Ruang Pendidikan Pemilih dengan luas 50 m<sup>2</sup>;
  - 9) Ruang Perpustakaan dengan luas 12 m<sup>2</sup>;
  - 10) 40% x luas (sebagai selasar, toilet dan mushola dan lain-lain) dengan luas 99 m<sup>2</sup>.
- b. Tipe II terdiri dari :
- 1) Ruang Kerja KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota dan Ruang Kerja Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota dengan luas masing – masing 14 m<sup>2</sup>;
  - 2) Ruang Kerja Sub Bagian dengan luas masing-masing 12 m<sup>2</sup>;
  - 3) Ruang Kerja Staff dengan luas masing-masing 3 m<sup>2</sup> dan Ruang Arsip 1 m<sup>2</sup>;
  - 4) Ruang Rapat Pleno dengan luas 96 m<sup>2</sup>;
  - 5) Gudang atau Ruang Arsip dengan luas masing-masing 30 m<sup>2</sup>;
  - 6) Gudang induk dengan luas 60 m<sup>2</sup>;
  - 7) Ruang Data Center dengan luas 6 m<sup>2</sup>;
  - 8) Ruang Media Center dan Ruang Pendidikan Pemilih dengan luas 50 m<sup>2</sup>;
  - 9) Ruang Perpustakaan dengan luas 12 m<sup>2</sup>;
  - 10) 35% x luas (sebagai selasar, toilet dan mushola dan lain-lain) dengan luas 87 m<sup>2</sup>.
- c. Tipe III terdiri dari :
- 1) Ruang Kerja KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota dan Ruang Kerja Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota dengan luas masing – masing 14 m<sup>2</sup>;
  - 2) Ruang Kerja Sub Bagian dengan luas masing-masing 12 m<sup>2</sup>;
  - 3) Ruang Kerja Staff dengan luas masing-masing 3 m<sup>2</sup> dan Ruang Arsip 1 m<sup>2</sup>;

- 4) Ruang Rapat Pleno dengan luas 96 m<sup>2</sup>;
- 5) Gudang atau Ruang Arsip dengan luas masing-masing 30 m<sup>2</sup>;
- 6) Gudang induk dengan luas 60 m<sup>2</sup>;
- 7) Ruang Data Center dengan luas 6 m<sup>2</sup>;
- 8) Ruang Media Center dan Ruang Pendidikan Pemilih dengan luas 50 m<sup>2</sup>;
- 9) Ruang Perpustakaan dengan luas 12 m<sup>2</sup>;
- 10) 30% x luas (sebagai selasar, toilet dan mushola dan lain-lain) dengan luas 47 m<sup>2</sup>.

d. Tipe IV terdiri dari :

- 1) Ruang Kerja KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota dan Ruang Kerja Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota dengan luas masing-masing 14 m<sup>2</sup>;
  - 2) Ruang Kerja Sub Bagian dengan luas masing-masing 12 m<sup>2</sup>;
  - 3) Ruang Kerja Staff dengan luas masing-masing 3 m<sup>2</sup> dan Ruang Arsip 1 m<sup>2</sup>;
  - 4) Ruang Rapat Pleno dengan luas 96 m<sup>2</sup>;
  - 5) Gudang atau Ruang Arsip dengan luas masing-masing 30 m<sup>2</sup>;
  - 6) Gudang induk dengan luas 60 m<sup>2</sup>;
  - 7) Ruang Data Center dengan luas 6 m<sup>2</sup>;
  - 8) Ruang Media Center dan Ruang Pendidikan Pemilih dengan luas 50 m<sup>2</sup>;
  - 9) Ruang Perpustakaan dengan luas 12 m<sup>2</sup>;
  - 10) 25% x luas (sebagai selasar, toilet dan mushola dan lain-lain) dengan luas 62 m<sup>2</sup>.
- (5) Luas tanah Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Tipe I, Tipe II , Tipe III dan Tipe IV minimal 1.000 m<sup>2</sup> maksimal 2 kali luas lahan tersebut.
- (6) Bangunan gedung kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dilengkapi dengan bangunan pagar yang disesuaikan dengan kondisi dan lokasi bangunan.

## BAB IV

### IDENTITAS BANGUNAN GEDUNG KOMISI PEMILIHAN UMUM

#### Pasal 6

- (1) Gedung kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memiliki tampak depan bangunan yang seragam.
- (2) Keseragaman tampak depan dimaksud pada ayat (1) dicirikan dengan penempatan Logo Komisi Pemilihan Umum pada pintu masuk utama gedung sebagaimana terlampir pada Lampiran II.
- (3) Spesifikasi Logo Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud ayat (2) berukuran 2,2 x 1,8 m.

## BAB V

### PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA

#### Pasal 7

Teknis penyelenggaraan pembangunan gedung Kantor KPU, KPU Provinsi, KIP Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota mempedomani ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 8

KPU melaksanakan pembinaan dan pengawasan setiap tahapan penyelenggaraan pembangunan Gedung Kantor KPU Provinsi, KIP Provinsi KPU Kabupaten/Kota, dan KIP Kabupaten/Kota.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN

#### Pasal 9

- (1) Kantor KPU Provinsi, KIP Provinsi, Kantor KPU Kabupaten/Kota, Kantor KIP Provinsi dan Kantor KIP Kabupaten/Kota yang sudah berdiri dibangun sebelum Keputusan ini ditetapkan dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, dapat menyesuaikan sepanjang terdapat ketersediaan lahan dan anggaran.

- (2) Penganggaran pemeliharaan lahan bangunan gedung kantor, ditentukan seluas batas maksimal lahan yang diatur dalam Peraturan ini.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juli 2011  
KOMISI PEMIIHAN UMUM,

HAFIZ ANSHARY AZ

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 1 Juli 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

Lampiran I

PEDOMAN STANDAR GEDUNG KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM,  
KPU PROVINSI, KIP PROVINSI, KPU KABUPATEN/KOTA, DAN KIP KABUPATEN/KOTA  
Nomor 04 Tahun 2011

NO	PROVINSI, KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KAB/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	TYPE KANTOR KPU PROVINSI				TYPE KANTOR KPU KABUPATEN/KOTA			
					I	II	III	IV	I	II	III	IV

I	DI ACEH DARUSSALAM	23	273	4,629,805				<b>IV</b>						
	1	KAB. ACEH SELATAN Tapak Tuan	16	218,138										IV
	2	KAB. ACEH TENGGARA Kutacane	16	170,105										IV
	3	KAB. ACEH TIMUR Langsa	24	362,610								III		
	4	KAB. ACEH TENGAH Takengon	14	203,628										IV
	5	KAB. ACEH BARAT Meulaboh	12	174,415										IV
	6	KAB. ACEH BESAR Jantho	23	318,950										IV
	7	KAB. PIDIE Sigli	23	400,771						II				
	8	KAB. ACEH UTARA Lhoksukon	27	534,411								III		
	9	KAB. SIMEULUE Sinabang	8	82,064										IV
	10	KAB. ACEH SINGKIL Singkil	10	108,718										IV
	11	KAB. BIREUEN Bireun	17	365,973								III		
	12	KAB. ACEH BARAT DAYA Blangpidie	9	117,727										IV
	13	KAB. GAYO LUES Blangkejeren	11	80,351										IV
	14	KAB. ACEH JAYA Calang	6	64,141										IV
	15	KAB. NAGAN RAYA Suka Makmue	5	173,960										IV
	16	KAB. ACEH TAMIANG Karang Baru	12	264,626										IV
	17	KAB. BENER MERIAH Simpang Tiga Redelo	7	227,974										IV



NO	PROVINSI, KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KAB/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	TYPE KANTOR KPU PROVINSI				TYPE KANTOR KPU KABUPATEN/KOTA			
					I	II	III	IV	I	II	III	IV

18	KAB.PIDIE JAYA Meureunde		8	135,127										IV
19	KOTA BANDA ACEH Banda Aceh		9	168,543										IV
20	KOTA SABANG Sabang		2	35,073										IV
21	KOTA LHOKEUMAWE Lhokseumawe		4	169,507										IV
22	KOTA LANGSA Langsa		5	178,496										IV
23	KOTA SABUSSALAM Sabulussalam		5	74,497										IV

II	PROVINSI SUMATERA UTARA	33	406	14,857,924			III							
1	KAB. TAPANULI TENGAH Sibolga		20	241,578										IV
2	KAB. TAPANULI UTARA Tarutung		15	301,958										IV
3	KAB.TAPANULI SELATAN Padang Sidempuan		28	658,952						II				
4	KAB. NIAS Gunung Sitoli		33	451,291									III	
5	KAB. LANGKAT Stabat		23	1,143,560					I					
6	KAB. KARO Kabanjahe		17	303,186						II				
7	KAB. DELI SERDANG Lubuk Pakam		22	1,647,570					I					
8	KAB. SIMALUNGUN Pamantang Siantar		31	874,549						II				
9	KAB. ASAHAN Kisaran		13	613,078					I					
10	KAB. LABUHAN BATU Rantau Prapat		22	1,005,456						II				
11	KAB. DAIRI Sidikalang		15	281,525										IV
12	KAB. TOBA SAMOSIR Balige		14	179,046										IV
13	KAB. MANDAILING NATAL Panyambungan		23	427,112									III	
14	KAB. NIAS SELATAN Taluk Dalam		8	289,432										IV
15	KAB. PAKPAK BHARAT Salak		8	36,066										IV
16	KAB HUMBANG HASUNDUTAN Dolok Sanggul		10	152,439										IV

NO	PROVINSI, KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KAB/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	TYPE KANTOR KPU PROVINSI				TYPE KANTOR KPU KABUPATEN/KOTA			
					I	II	III	IV	I	II	III	IV

17	KAB. SAMOSIR Pangururan		9	115,942											IV
18	KAB. SERDANG BEDAGAI Sei Rampah		17	603,452						II					
19	KAB BATU BARA Lima Puluh		7	348,057											IV
20	KAB PADANG LAWAS UTARA		8	202,686											IV
21	KAB PADANG LAWAS		9	189,246											IV
22	KOTA MEDAN Madan		21	2,679,720											IV
23	KOTA PEMATANG SIANTAR Pamatang Siantar		7	287,488											IV
24	KOTA SIBOLGA Sibolga		4	86,749											
25	KOTA TANJUNG BALAI Tanjung Balai		6	172,799											
26	KOTA BINJAI Binjai		5	286,248											
27	KOTA TEBING TINGGI Tebing Tinggi		5	137,135											
28	KOTA PADANG SIDEMPUAN Padang Sidempuan		6	233,453											
29	KAB. LABUHAN BATU SELATAN			263,126						I					
30	KAB. LABUHAN BATU UTARA			327,162											IV
31	KAB. NIAS UTARA			131,246											IV
32	KAB. NIAS BARAT			79,032											IV
33	KOTA GUNUNG SITOLI			107,585											IV

III	SUMATERA BARAT		19	155	4,169,848					IV					
	1	KAB. PESISIR SELATAN Painan		12	419,687									III	
	2	KAB. SOLOK Arosuka		14	348,155									III	
	3	KAB. SW.LUNTO/SIJUNJUNG Muaro Sijunjung		8	183,277										IV

NO	PROVINSI, KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KAB/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	TYPE KANTOR KPU PROVINSI				TYPE KANTOR KPU KABUPATEN/KOTA			
					I	II	III	IV	I	II	III	IV

	4	KAB. TANAH DATAR Batusangkar		15	318,782								III	
	5	KAB. PADANG PARIAMAN Pariaman		17	344,278								III	
	6	KAB. AGAM Lubuk Basung		16	438,525								III	
	7	KAB. LIMA PULUH KOTA Sarilamak		13	329,080								III	
	8	KAB. PASAMAN Lubuk Sikaping		12	273,037									IV
	9	KAB. KEPULAUAN MENTAWAI Tuapejat		9	53,893									IV
	10	KAB. DHARMASRAYA Pulau Punjung		4	155,335									IV
	11	KAB. SOLOK SELATAN Padang Aro		7	136,558									IV
	12	KAB. PASAMAN BARAT Simpang Empat		11	328,665								III	
	13	KOTA PADANG Padang		11	717,651						II			
	14	KOTA SOLOK Solok		2	66,478									IV
	15	KOTA SAWAHLUNTO Sawahlunto		4	56,447									IV
	16	KOTA PADANG PANJANG Padang Panjang		2	48,916									IV
	17	KOTA BUKITTINGGI Bukittinggi		3	108,084									IV
	18	KOTA PAYAKUMBUH Payakumbuh		3	109,047									IV
	19	KOTA PARIAMAN Pariaman		3	75,358									IV

IV	RIAU		13	151	5,209,383					IV				
	1	KAB. KAMPAR Bangkinang		20	592,349								III	
	2	KAB. INDRAGIRI HULU Rengat		14	303,114									IV
	3	KAB. BENGKALIS Bengkalis		13	643,188								III	
	4	KAB. INDRAGIRI HILIR Tembilahan		20	668,815								III	
	5	KAB. PELALAWAN Pangkalan Kerinci		12	175,686									IV

NO	PROVINSI, KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KAB/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	TYPE KANTOR KPU PROVINSI				TYPE KANTOR KPU KABUPATEN/KOTA			
					I	II	III	IV	I	II	III	IV

6	KAB. ROKAN HULU Pasir Pengairan		16	365,229									IV
7	KAB. ROKAN HILIR Ujung Tanjung		13	481,570								III	
8	KAB. SIAK Siak Sriindrapura		14	313,842									IV
9	KAB. KUANTAN SINGINGI Teluk Kuantan		12	361,575									IV
10	KOTA PEKANBARU Pekanbaru		12	871,730						II			
11	KOTA DUMAI Dumai		5	238,030									IV
12	KAB. MANDAU												
13	KAB. KEPULAUAN MERANTI			194,255									IV

V	JAMBI	11	114	2,885,988				IV					
1	KAB. KERINCI Sungai Penuh		17	316,491									IV
2	KAB. MERANGIN Bangko		18	259,760									IV
3	KAB. SAROLANGUN Sarolangun		10	202,684									IV
4	KAB. BATANGHARI Muara Bulian		8	202,001									IV
5	KAB. MUARO JAMBI Sengeti		8	306,559									IV
6	KAB TANJUNG JABUNG BARAT Kuala Tungkal		5	244,085									IV
7	KAB TANJUNG JABUNG TIMUR Muara Sabak		11	207,836									IV
8	KAB. BUNGO Muara Bungo		17	271,144									IV
9	KAB. TEBO Muara Tebo		12	249,098									IV
10	KOTA JAMBI Jambi		8	547,201								III	
11	KOTA SUNGAI PENUH			79,129									IV

NO	PROVINSI, KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KAB/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	TYPE KANTOR KPU PROVINSI				TYPE KANTOR KPU KABUPATEN/KOTA			
					I	II	III	IV	I	II	III	IV

VI	SUMATERA SELATAN		15	218	7,228,030			III						
	1	KAB. OGAN KOMERING ULU Baturaja		11	294,245									IV
	2	KAB. OGAN KOMERING ILIR Kayu Agung		18	635,891								III	
	3	KAB. MUARA ENIM Muara Enim		22	648,747								III	
	4	KAB. LAHAT Lahat		24	345,368								III	
	5	KAB. MUSI RAWAS Lubuk Linggau		21	433,462								III	
	6	KAB. MUSI BANYUASIN Sekayu		11	534,637								III	
	7	KAB. BANYUASIN Pangkalan Balai		15	939,625						II			
	8	KAB. OKU TIMUR Martapura		20	584,972								III	
	9	KAB. OKU SELATAN Muaradua		20	290,291								III	
	10	KAB. OGAN ILIR Indralaya		16	407,414								III	
	11	KAB EMPAT LAWANG Tebing Tinggi		7	188,559									IV
	12	KOTA PALEMBANG Pelembang		14	1,489,181					I				
	13	KOTA PAGAR ALAM Pagar Alam		5	132,226									IV
	14	KOTA LUBUK LINGGAU Lubuk Linggau		8	180,692									IV
	15	KOTA PRABUMULIH Prabumulih		6	122,720									IV

VII	BENGKULU		10	110	1,810,953			IV						
	1	KAB. BENGKULU SELATAN Manna		11	144,445									IV
	2	KAB. REJANG LEBONG Curup		15	227,565									IV

NO	PROVINSI, KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KAB/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	TYPE KANTOR KPU PROVINSI				TYPE KANTOR KPU KABUPATEN/KOTA			
					I	II	III	IV	I	II	III	IV

3	KAB. BENGKULU UTARA Arga Makmur		18	362,220								III	
4	KAB. KAUR Bintuhan		15	154,795									IV
5	KAB. SELUMA Tais		14	202,062									IV
6	KAB. MUKO MUKO Mukomuko		15	137,127									IV
7	KAB. LEBONG Tubei		6	113,539									IV
8	KAB. KEPAHANG Kepahiang		8	125,901									IV
9	KOTA BENGKULU Bengkulu		8	239,742									IV
10	KAB. BENGKULU TENGAH			103,557									IV

VIII	LAMPUNG	14	208	9,101,643			III						
1	KAB. LAMPUNG SELATAN Kalianda		24	1,255,516				I					
2	KAB. LAMPUNG TENGAH Gunung Sugih		28	1,149,419					II				
3	KAB. LAMPUNG UTARA Kotabumi		23	611,711							III		
4	KAB. LAMPUNG BARAT Liwa		14	410,723					II				
5	KAB. TULANG BAWANG Menggala		28	1,237,301					II				
6	KAB. TANGGAMUS Kota Agung		28	891,639					II				
7	KAB. LAMPUNG TIMUR Sukadana		24	946,846					II				
8	KAB. WAY KANAN Blambangan Umpu		14	415,716							III		
9	KAB PASAWARAN		7	389,714									IV
10	KOTA BANDAR LAMPUNG Bandar Lampung		13	838,819					II				
11	KOTA METRO Metro		5	150,625									IV
12	KAB. TULANGBAWANG BARAT			255,170									IV
13	KAB. PRING SEWU			355,255							III		
14	KAB. MESUJI			193,189									IV

NO	PROVINSI, KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KAB/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	TYPE KANTOR KPU PROVINSI				TYPE KANTOR KPU KABUPATEN/KOTA			
					I	II	III	IV	I	II	III	IV

IX	KEP. BANGKA BELITUNG		7	38	1,049,502				IV				
	1	KAB. BANGKA Sungai Liat		8	243,392								IV
	2	KAB. BELITUNG Tanjung Pandan		5	148,939								IV
	3	KAB. BANGKA SELATAN Toboali		5	148,702								IV
	4	KAB. BANGKA TENGAH Koba		6	128,942								IV
	5	KAB. BANGKA BARAT Mentok		5	140,289								IV
	6	KAB. BELITUNG TIMUR Manggar		4	98,194								IV
	7	KOTA PANGKAL PINANG Pangkal Pinang		5	141,044								IV

X	KEPULAUAN RIAU		7	56	1,593,461				IV				
	1	KAB. BINTAN Bandar Seri Bentan		10	147,208								IV
	2	KAB. KARIMUN Tj. Balai Karimun		9	225,673								IV
	3	KAB. NATUNA Ranai		16	122,153								IV
	4	KAB. LINGGA Daik Lingga		5	87,461								IV
	5	KOTA BATAM Batam		12	782,667						II		
	6	KOTA TANJUNG PINANG Tanjung Pinang		4	193,428								IV
	7	KAB. KEP. ANAMBLAS			34,871								IV

XI	DKI JAKARTA		6	44	8,477,125			III					
	1	KAB. ADM. KEP. SERIBU P. Seribu		2	21,439								IV
	2	KODYA JAKARTA PUSAT Tanah Abang		8	931,505						II		
	3	KODYA JAKARTA UTARA Tanjung Priok		6	1,421,272					I			

NO	PROVINSI, KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KAB/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	TYPE KANTOR KPU PROVINSI				TYPE KANTOR KPU KABUPATEN/KOTA			
					I	II	III	IV	I	II	III	IV

4	KODYA JAKARTA BARAT Grogol Petamburan		8	1,622,583					I			
5	KODYA JAKARTA SELATAN Kebayoran Baru		10	1,886,465					I			
6	KODYA JAKARTA TIMUR Cakung		10	2,593,861					I			

XII	JAWA BARAT	26	613	40,776,631	I							
1	KAB. BOGOR Cibinong		40	4,282,437					I			
2	KAB. SUKABUMI Sukabumi		46	2,202,734					I			
3	KAB. CIANJUR Cianjur		32	2,308,413					I			
4	KAB. BANDUNG Soreang		30	3,006,027					I			
5	KAB. GARUT Garut		42	2,329,441					I			
6	KAB. TASIKMALAYA Singaparna		39	1,808,779					I			
7	KAB. CIAMIS Ciamis		36	1,538,539					I			
8	KAB. KUNINGAN Kuningan		32	1,160,983					I			
9	KAB. CIREBON Sumber		40	2,099,995					I			
10	KAB. MAJALENGKA Majalengka		23	1,154,920					I			
11	KAB. SUMEDANG Sumedang		26	1,078,303					I			
12	KAB. INDRAMAYU Indramayu		31	1,808,083					I			
13	KAB. SUBANG Subang		30	1,489,365					I			
14	KAB. PURWAKARTA Purwakarta		17	883,641						II		
15	KAB. KARAWANG Karawang		30	1,922,534					I			
16	KAB. BEKASI Cikarang		23	1,921,803					I			
17	KAB. BANDUNG BARAT Ngamprah		15	1,442,124					I			
18	KOTA BOGOR Bogor		6	992,471						II		
19	KOTA SUKABUMI Sukabumi		7	227,373							III	



NO	PROVINSI, KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KAB/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	TYPE KANTOR KPU PROVINSI				TYPE KANTOR KPU KABUPATEN/KOTA			
					I	II	III	IV	I	II	III	IV

20	KOTA BANDUNG Bandung		30	2,214,699					I			
21	KOTA CIREBON Cirebon		5	279,705								IV
22	KOTA BEKASI Bekasi		12	2,097,853					I			
23	KOTA DEPOK Depok		6	1,214,203					I			
24	KOTA CIMAHU Cimahi		3	548,832							III	
25	KOTA TASIKMALAYA Tasikmalaya		8	581,764						II		
26	KOTA BANJAR Banjar		4	181,610								IV

XIII	JAWA TENGAH	35	568	35,415,953	I							
1	KAB. CILACAP Cilacap		24	1,860,240					I			
2	KAB. BANYUMAS Purwokerto		27	1,746,971					I			
3	KAB. PURBALINGGA Purbalingga		18	916,575						II		
4	KAB. BANJARNEGARA Banjarnegara		20	1,009,005						II		
5	KAB. KEBUMEN Kebumen		26	1,222,356					I			
6	KAB. PURWOREJO Purworejo		16	909,400						II		
7	KAB. WONOSOBO Wonosobo		15	812,881						II		
8	KAB. MAGELANG Mungkid		21	1,185,989					I			
9	KAB. BOYOLALI Boyolali		19	936,772						II		
10	KAB. KLATEN Klaten		26	1,458,794					I			
11	KAB. SUKOHARJO Sukoharjo		12	830,433						II		
12	KAB. WONOGIRI Wonogiri		25	1,186,556					I			
13	KAB. KARANGANYAR Karanganyar		17	844,943						II		
14	KAB. SRAGEN Sragen		20	893,980						II		
15	KAB. GROBOGAN Purwodadi		19	1,380,491					I			
16	KAB. BLORA Blora		16	951,559						II		

NO	PROVINSI, KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KAB/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	TYPE KANTOR KPU PROVINSI				TYPE KANTOR KPU KABUPATEN/KOTA			
					I	II	III	IV	I	II	III	IV

	17	KAB. REMBANG Rembang		14	547,708							III	
	18	KAB. PATI Pati		21	1,260,203					I			
	19	KAB. KUDUS Kudus		9	730,932						II		
	20	KAB. JEPARA Jepara		14	1,043,573					I			
	21	KAB. DEMAK Demak		14	1,001,965					I			
	22	KAB. SEMARANG Ungaran		19	968,654						II		
	23	KAB. TEMANGGUNG Temanggung		20	768,075						II		
	24	KAB. KENDAL Kendal		20	1,050,843						II		
	25	KAB. BATANG Batang		12	739,751						II		
	26	KAB. PEKALONGAN Kajen		19	938,715						II		
	27	KAB. PEMALANG Pemalang		14	1,343,927					I			
	28	KAB. TEGAL Slawi		18	1,909,426					I			
	29	KAB. BREBES Brebes		17	1,907,284					I			
	30	KOTA MAGELANG Magelang		3	127,784								IV
	31	KOTA SURAKARTA Surakarta		5	460,005						II		
	32	KOTA SALATIGA Salatiga		4	166,466								IV
	33	KOTA SEMARANG Semarang		16	1,751,453					I			
	34	KOTA PEKALONGAN Pekalongan		4	290,567								IV
	35	KOTA TEGAL Tegal		4	261,677								IV

XIV	DAISTA YOGYAKARTA		5	78	3,604,805					IV			
	1	KAB. KULON PROGO Wates		12	458,298							III	
	2	KAB. BANTUL Bantul		17	911,359						II		
	3	KAB. GUNUNG KIDUL Wonosari		18	703,632						II		
	4	KAB. SLEMAN Sleman		17	1,096,972						II		
	5	KOTA YOGYAKARTA Yogyakarta		14	434,544						II		

NO	PROVINSI, KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KAB/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	TYPE KANTOR KPU PROVINSI				TYPE KANTOR KPU KABUPATEN/KOTA			
					I	II	III	IV	I	II	III	IV

XV	JAWA TIMUR	38	657	37,673,713	I										
1	KAB. PACITAN Pacitan		12	589,153									II		
2	KAB. PONOROGO Ponorogo		21	1,011,854						I					
3	KAB. TRENGGALEK Trenggalek		14	735,281									II		
4	KAB. TULUNGAGUNG Tulungagung		19	1,118,317						I					
5	KAB. BLITAR Blitar		22	1,257,577						I					
6	KAB. KEDIRI Kediri		26	1,513,509						I					
7	KAB. MALANG Kapanjen		33	2,323,453						I					
8	KAB. LUMAJANG Lumajang		21	1,109,582						I					
9	KAB. JEMBER Jember		31	2,216,499						I					
10	KAB. BANYUWANGI Banyuwangi		24	1,582,316						I					
11	KAB. BONDOWOSO Bondowoso		20	671,330									II		
12	KAB. SITUBONDO Situbondo		17	576,905									II		
13	KAB. PROBOLINGGO Probolinggo		24	1,091,305						I					
14	KAB. PASURUAN Pasuruan		24	1,191,471						I					
15	KAB. SIDOARJO Sidoarjo		18	1,934,697						I					
16	KAB. MOJOKERTO Mojokerto		18	991,417									II		
17	KAB. JOMBANG Jombang		21	1,251,887						I					
18	KAB. NGANJUK Nganjuk		20	1,053,010						I					
19	KAB. MADIUN Madiun		15	669,716									II		
20	KAB. MAGETAN Magetan		18	637,565									II		
21	KAB. NGAWI Ngawi		19	874,086									II		
22	KAB. BOJONEGORO Bojonegoro		27	1,230,776						I					
23	KAB. TUBAN Tuban		20	1,097,106						I					
24	KAB. LAMONGAN Lamongan		27	1,405,671						I					
25	KAB. GRESIK Gresik		18	1,235,706						I					
26	KAB. BANGKALAN Bangkalan		18	885,051									II		

NO	PROVINSI, KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KAB/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	TYPE KANTOR KPU PROVINSI				TYPE KANTOR KPU KABUPATEN/KOTA			
					I	II	III	IV	I	II	III	IV

27	KAB. SAMPANG Sampang		14	865,690						II			
28	KAB. PAMEKASAN Pamekasan		13	751,298						II			
29	KAB. SUMENEP Sumenep		27	923,532					I				
30	KOTA KEDIRI Kediri		3	260,919									IV
31	KOTA BLITAR Blitar		3	130,617									IV
32	KOTA MALANG Malang		5	791,577						II			
33	KOTA PROBOLINGGO Probolinggo		3	206,001									IV
34	KOTA PASURUAN Pasuruan		3	176,218									IV
35	KOTA MOJOKERTO Mojokerto		2	119,523									IV
36	KOTA MADIUN Madiun		3	235,450									IV
37	KOTA SURABAYA Surabaya		31	2,736,127					I				
38	KOTA BATU Batu		3	221,521									IV

XVI	BANTEN		7	154	9,229,017			III					
1	KAB. PANDEGLANG Pandeglang		35	1,153,387					I				
2	KAB. LEBAK Rangkas Bitung		28	1,178,131					I				
3	KAB. TANGERANG Tigaraksa		36	3,320,488					I				
4	KAB. SERANG Serang		28	1,370,021					I				
5	KOTA TANGERANG Tangerang		13	1,382,412					I				
6	KOTA CILEGON Cilegon		8	321,089							III		
7	KOTA SERANG		6	503,489									IV

XVII	BALI		9	57	3,577,451			IV					
1	KAB. JEMBRANA Negara		5	259,582									IV
2	KAB. TABANAN Tabanan		10	421,333							III		

NO	PROVINSI, KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KAB/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	TYPE KANTOR KPU PROVINSI				TYPE KANTOR KPU KABUPATEN/KOTA			
					I	II	III	IV	I	II	III	IV

	3	KAB. BADUNG Badung		6	404,111								III	
	4	KAB. GIANYAR Gianyar		7	433,082								III	
	5	KAB. KLUNGKUNG Semarapura		4	179,866									IV
	6	KAB. BANGLI Bangli		4	222,411									IV
	7	KAB. KARANGASEM Karang Asem		8	427,485								III	
	8	KAB. BULELENG Singaraja		9	653,130						II			
	9	KOTA DENPASAR Denpasar		4	576,451								III	

XVIII	NUSA TENGGARA BARAT		10	116	4,539,674				IV					
	1	KAB. LOMBOK BARAT Mataram		15	730,288							II		
	2	KAB. LOMBOK TENGAH Praya		12	828,376							II		
	3	KAB. LOMBOK TIMUR Selong		20	1,149,193					I				
	4	KAB. SUMBAWA Sumbawa Besar		24	410,873								III	
	5	KAB. DOMPU Dompu		8	210,794									IV
	6	KAB. BIMA Raba-Bima		18	436,440								III	
	7	KAB. SUMBAWA BARAT Taliwang		8	122,631									IV
	8	KOTA MATARAM Mataram		6	360,442								III	
	9	KOTA BIMA Bima		5	104,761									IV
	10	KAB. LOMBOK UTARA			185,876									

XIX	NUSA TENGGARA TIMUR		21	258	4,133,558				IV					
	1	KAB. KUPANG Kupang		22	309,046								III	
	2	KAB TIMOR TENGAH SELATAN Soe		32	416,113								III	
	3	KAB. TIMOR TENGAH UTARA Kafemananu		9	205,994									IV
	4	KAB. BELU Atambua		24	378,018								III	

NO	PROVINSI, KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KAB/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	TYPE KANTOR KPU PROVINSI				TYPE KANTOR KPU KABUPATEN/KOTA			
					I	II	III	IV	I	II	III	IV

5	KAB. ALOR Kalabahi		17	185,341									IV
6	KAB. FLORES TIMUR Larantuka		18	203,402									IV
7	KAB. SIKKA Maumere		21	298,881									IV
8	KAB. ENDE Ende		20	238,197									IV
9	KAB. NGADA Bajawa		9	127,109									IV
10	KAB. MANGGARAI Ruteng		6	158,417								III	
11	KAB. SUMBA TIMUR Waingapu		22	213,286									IV
12	KAB. SUMBA BARAT Waikabubak		6	103,429									IV
13	KAB. LEMBATA		8	107,386									IV
14	KAB. ROTE NDAO Baa		8	115,332									IV
15	KAB. MANGGARAI BARAT Labuan Bajo		7	206,951									IV
16	KAB. NAGEKEO Mbay		7	122,780									IV
17	KAB. SUMBA TENGAH Waibakul		4	60,262									IV
18	KAB. SUMBA BARAT DAYA Tambolaka		8	212,335									IV
19	KAB MANGGARAI TIMUR		6	138,517									IV
20	KOTA KUPANG Kupang		4	274,344									IV
21	KAB. SABU RAIJUA			58,418									IV

XX	KALIMANTAN BARAT	14	180	4,566,296					IV				
1	KAB. SAMBAS Sambas		19	543,965								III	
2	KAB. PONTIANAK Mempawah		9	251,906						II			
3	KAB. SANGGAU Sanggau		15	381,172								III	
4	KAB. KETAPANG Ketapang		25	539,997						II			
5	KAB. SINTANG Sintang		14	305,341								III	
6	KAB. KAPUAS HULU Putussibau		25	214,548									IV
7	KAB. BENGKAYANG Bengkayang		17	211,449									IV

NO	PROVINSI, KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KAB/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	TYPE KANTOR KPU PROVINSI				TYPE KANTOR KPU KABUPATEN/KOTA			
					I	II	III	IV	I	II	III	IV

	8	KAB. LANDAK Ngabang		13	346,772							III	
	9	KAB. SEKADAU Sekadau		7	186,234								IV
	10	KAB. MELAWI Nanga Pinoh		11	152,519								IV
	11	KAB. KAYONG UTARA Sukadane		5	85,759								IV
	12	KAB. KUBU RAYA		9	517,123								IV
	13	KOTA PONTIANAK Pontianak		6	634,562							III	
	14	KOTA SINGKAWANG Singkawang		5	194,949								IV

XXI	KALIMANTAN TENGAH		14	119	1,952,252				IV				
	1	KAB. KOTAWARINGIN BARAT Pangkalan Bun		6	217,777								IV
	2	KAB. KOTAWARINGIN TIMUR Sampit		15	319,656							III	
	3	KAB. KAPUAS Kuala Kapuas		12	340,639							III	
	4	KAB. BARITO SELATAN Buntok		6	118,805								IV
	5	KAB. BARITO UTARA Muara Teweh		6	104,720								IV
	6	KAB. KATINGAN Kasongan		13	94,424								IV
	7	KAB. SERUYAN Kuala Pembuang		5	143,201								IV
	8	KAB. SUKAMARA Sukamara		5	35,535								IV
	9	KAB. LAMANDAU Nanga Bulik		8	50,625								IV
	10	KAB. GUNUNG MAS Kuala Kurun		11	88,682								IV
	11	KAB. PULANG PISAU Pulang Pisau		8	119,776								IV

NO	PROVINSI, KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KAB/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	TYPE KANTOR KPU PROVINSI				TYPE KANTOR KPU KABUPATEN/KOTA			
					I	II	III	IV	I	II	III	IV

12	KAB. MURUNG RAYA Puruk Cahu		10	80,225									IV
13	KAB. BARITO TIMUR Tamiang Layang		9	82,478									IV
14	KOTA PALANGKARAYA Palangkaraya		5	155,709									IV

XXII	KALIMANTAN SELATAN	13	144	3,300,855				IV					
1	KAB. TANAH LAUT Pelaihari		9	269,811									IV
2	KAB. KOTABARU Kotabaru		20	303,984									IV
3	KAB. BANJAR Martapura		17	438,259							III		
4	KAB. BARITO KUALA Marabahan		17	277,185									IV
5	KAB. TAPIN Rantau		12	143,998									IV
6	KAB. HULU SUNGAI SELATAN Kandangan		11	208,421									IV
7	KAB. HULU SUNGAI TENGAH Berabai		11	241,147									IV
8	KAB. HULU SUNGAI UTARA Amuntai		7	196,807									IV
9	KAB. TABALONG Tanjung		12	201,855									IV
10	KAB. TANAH BUMBU Batulicin		10	202,996									IV
11	KAB. BALANGAN Paringin		8	101,187									IV
12	KOTA BANJARMASIN Banjarmasin		5	572,368							II		
13	KOTA BANJARBARU Banjarbaru		5	142,837									IV

XXIII	KALIMANTAN TIMUR	14	139	3,251,142				IV					
1	KAB. PASER Tanah Grogot		10	189,467									IV
2	KAB. KUTAI KERTANEGARA Tenggarong		18	560,948							II		



NO	PROVINSI, KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KAB/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	TYPE KANTOR KPU PROVINSI				TYPE KANTOR KPU KABUPATEN/KOTA			
					I	II	III	IV	I	II	III	IV

3	KAB. BERAU Tanjung Redeb		13	161,539										IV
4	KAB. BULUNGAN Tanjung Selor		13	126,070										IV
5	KAB. NUNUKAN Nunukan		9	103,608										IV
6	KAB. MALINAU Malinau		12	63,018										IV
7	KAB. KUTAI BARAT Sendawar		21	155,601										IV
8	KAB. KUTAI TIMUR Sanggatta		18	206,240										IV
9	KAB. PENAJAM PASER UTARA Penajam		4	143,844										IV
10	KOTA TANA TIDUNG		3	12,501										IV
11	KOTA BALIKPAPAN Balikpapan		5	518,007						II				
12	KOTA SAMARINDA Samarinda		6	659,002						II				
13	KOTA TARAKAN Tarakan		4	182,300										IV
14	KOTA BONTANG Bontang		3	168,997										IV

XXIV	SULAWESI UTARA	15	146	2,302,043				IV						
1	KAB. BOLAANG MANGONDOW Kotamubagu		22	324,738									III	
2	KAB. MINAHASA Tondano		18	301,941									III	
3	KAB. KEPULAUAN SANGIHE Tahuna		14	129,493										IV
4	KAB. KEPULAUAN TALAUD Melongguane		19	84,714										IV
5	KAB. MINAHASA SELATAN Amurang		17	201,293										IV
6	KAB. MINAHASA UTARA Air Madidi		9	149,483										IV
7	KAB. MINAHASA TENGGARA Ratahan		6	107,496										IV
8	KAB. BOLMONG UTARA Boroko		6	67,924										IV

NO	PROVINSI, KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KAB/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	TYPE KANTOR KPU PROVINSI				TYPE KANTOR KPU KABUPATEN/KOTA			
					I	II	III	IV	I	II	III	IV

	9	KAB. KEP. SITARO Ondong Siau		9	64,987															IV
	10	KOTA MANADO Manado		9	400,203															III
	11	KOTA BITUNG Bitung		8	175,137															IV
	12	KOTA TOMOHON Tomohon		5	80,389															IV
	13	KOTA MOBAGU Kotamobagu		4	97,993															IV
	14	KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN			54,709															IV
	15	KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR			61,543															IV

XXV	SULAWESI TENGAH			11	141	2,615,257														IV
	1	KAB. BANGGAI Luwuk			13	303,119														III
	2	KAB. POSO Poso			18	189,744														IV
	3	KAB. DONGGALA Donggala			30	465,034														III
	4	KAB. TOLI TOLI Toli Toli			10	233,324														IV
	5	KAB. BUOL Buol			11	125,474														IV
	6	KAB. MOROWALI Bungku			13	181,352														IV
	7	KAB BANGGAI KEPULAUAN Salakan			19	157,290														IV
	8	KAB. PARIGI MOUTONG Parigi			14	370,871														III
	9	KAB. TOJO UNA UNA Ampana			9	124,852														IV
	10	KOTA PALU Palu			4	262,410														IV
	11	KAB. SIGI				201,787														IV

XXVI	SULAWESI SELATAN			24	299	6,712,402														III
	1	KAB. SELAYAR Benteng			9	131,182														IV
	2	KAB. BULUKUMBA Bulukumba			10	440,917														III

NO	PROVINSI, KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KAB/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	TYPE KANTOR KPU PROVINSI				TYPE KANTOR KPU KABUPATEN/KOTA			
					I	II	III	IV	I	II	III	IV

3	KAB. BANTAENG Bantaeng		8	208,513									IV
4	KAB. JENEPONTO Jeneponto		11	342,553								III	
5	KAB. TAKALAR Takalar		9	265,639									IV
6	KAB. GOWA Sunggu Minahasa		18	585,747							II		
7	KAB. SINJAI Sinjai		9	226,216									IV
8	KAB. BONE Watampone		27	696,161							II		
9	KAB. MAROS Maros		14	304,162									IV
10	KAB. PANGKAJENE KEP. Pangkep		12	324,435									IV
11	KAB. BARRU Barru		7	168,427									IV
12	KAB. SOPPENG Watan Soppeng		7	219,130									IV
13	KAB. WAJO Sengkang		14	381,248								III	
14	KAB. SIDENRENG RAPANG Sidenreng		11	286,300									IV
15	KAB. PINRANG Pinrang		12	367,349								III	
16	KAB. ENREKANG Enrekang		11										IV
17	KAB. LUWU Palopo		21									III	
18	KAB. TANA TORAJA Makale		40									III	
19	KAB. LUWU UTARA Masamba		11										IV
20	KAB. LUWU TIMUR Malili		11										IV
21	KOTA MAKASAR Makassar		14	1,268,168						I			
22	KOTA PARE PARE Pare Pare		4	124,488									IV
23	KOTA PALOPO Palopo		9	129,825									IV
24	KAB. TORAJA UTARA			241,942									IV

XXVII	SULAWESI TENGGARA Kendari	12	155	2,003,870					IV				
1	KAB. KOLAKA Kolaka		14	266,714									IV
2	KAB. KONAWE Unaaha		26	226,051									IV

NO	PROVINSI, KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KAB/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	TYPE KANTOR KPU PROVINSI				TYPE KANTOR KPU KABUPATEN/KOTA						
					I	II	III	IV	I	II	III	IV			
	3	KAB. MUNA Raha		24	258,248										IV
	4	KAB. BUTON Pasar Wajo		21	272,694										IV
	5	KAB. KONAWE SELATAN Andoolo		22	245,504										IV
	6	KAB. BOMBANA Rumbia		6	107,590										IV
	7	KAB. WAKATOBI Wangi Wangi		8	100,563										IV
	8	KAB. KOLAKA UTARA Lasusua		6	103,505										IV
	9	KAB. KONAWE UTARA Wanggudu		7	57,908										IV
	10	KAB. BUTON UTARA Buranga		5	42,792										IV
	11	KOTA KENDARI Kendari		10	183,702										IV
	12	KOTA BAU BAU Bau Bau		6	138,599										IV

XXVIII	GORONTALO Gorontalo	6	70	1,130,285					IV						
	1	KAB. GORONTALO Gorontalo		22	468,022									III	
	2	KAB. BOALEMO Tilamuta		7	125,419										IV
	3	KAB. BONE BOLANGO Suwawa		17	150,173										IV
	4	KAB. PAHUWATO Marisa		13	115,457										IV
	5	KAB. GORONTALO UTARA Kwandang		5	106,059										IV
	6	KOTA GORONTALO Gorontalo		6	165,155										IV

XXIX	SULAWESI BARAT Mamuju	5	65	1,105,232					IV						
	1	KAB. MAMUJU UTARA Pasangkayu		11	122,261										IV
	2	KAB. MAMUJU Mamuju		15	300,127										IV
	3	KAB. MAMASA Mamasa		15	129,546										IV
	4	KAB. POLEWALI MAMASA Polewali		16	414,589									III	
	5	KAB. MAJENE Majene		8	138,709										IV

NO	PROVINSI, KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KAB/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	TYPE KANTOR KPU PROVINSI				TYPE KANTOR KPU KABUPATEN/KOTA			
					I	II	III	IV	I	II	III	IV

XXX	MALUKU Ambon	11	66	1,527,190				IV				
	1 KAB. MALUKU TENGAH Masohi		11	341,710							III	
	2 KAB. MALUKU TENGGARA Tual		6	103,107								IV
	3 KAB MALUKU TENGGARA BRT Saumlaki		17	152,762								IV
	4 KAB. BURU Namlea		10	153,657								IV
	5 KAB. SERAM BAGIAN TIMUR Dataran Hunimoa		6	117,134								IV
	6 KAB. SERAM BAGIAN BARAT Dataran Hunipopu		4	152,026								IV
	7 KAB. KEPULAUAN ARU Dobo		3	107,739								IV
	8 KOTA AMBON Ambon		5	227,246								IV
	9 KOTA TUAL		4	53,739								IV
	10 KAB. BURU SELATAN			52,494								IV
	11 KAB. MALUKU BARAT DAYA			65,576								IV

XXXI	MALUKU UTARA	9	97	1,096,443				IV				
	1 KAB. HALMAHERA BARAT Ternate		9	105,316								IV
	2 KAB. HALMAHERA TENGAH Weda		6	36,205								IV
	3 KAB. HALMAHERA UTARA Tobelo		22	216,557								IV

NO	PROVINSI, KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KAB/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	TYPE KANTOR KPU PROVINSI				TYPE KANTOR KPU KABUPATEN/KOTA			
					I	II	III	IV	I	II	III	IV

4	KAB. HALMAHERA SELATAN Labuha		30	202,131										IV
5	KAB. KEPULAUAN SULA Sanana		6	155,835										IV
6	KAB. HALMAHERA TIMUR Maba		10	59,060										IV
7	KOTA TERNATE Ternate		6	175,793										IV
8	KOTA TIDORE KEPULAUAN Kota Tidore Kepulauan		8	92,034										IV
9	KAB KEPULAUAN MOROTAI			53,512										IV

XXXII	P A P U A Jayapura	29	253	2,708,938				IV						
1	KAB. MERAUKE Merauke		20	173,476										IV
2	KAB. JAYAWIJAYA Wamena		11	162,700								III		
3	KAB. JAYAPURA Jayapura		19	113,437										IV
4	KAB. NABIRE Nabire		10	160,876										IV
5	KAB. YAPEN WAROPEN Serui		12	79,331										IV
6	KAB. BIAK NUMFOR Biak		10	109,747										IV
7	KAB. PUNCAK JAYA Kota Mulia		6	110,964										IV
8	KAB. PANIAI Enarotali		21	214,179										IV
9	KAB. MIMIKA Timika		13	126,044										IV
10	KAB. SARMI Sarmi		8	31,383										IV
11	KAB. KEEROM Waris		5	41,692										IV
12	KAB PEGUNUNGAN BINTANG Oksibil		6	55,288										IV
13	KAB. YAHUKIMO Sumohai		3	142,014										IV
14	KAB. TOLIKARA Karubaga		28	224,688										IV
15	KAB. WAROPEN Botawa		3	21,503										IV
16	KAB. BOVEN DIGOEL Tanah Merah		5	31,234										IV

NO	PROVINSI, KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KAB/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	TYPE KANTOR KPU PROVINSI				TYPE KANTOR KPU KABUPATEN/KOTA			
					I	II	III	IV	I	II	III	IV

17	KAB. MAPPI Kepi		6	75,525									IV
18	KAB. ASMAT Agats		7	70,794									IV
19	KAB. SUPIORI Sorendiweri		5	15,577									IV
20	KAB. MEMBERAMO RAYA Burmeseo		8	20,345									IV
21	KOTA JAYAPURA Jayapura		5	200,149									IV
22	KAB. MAMBERAMO TENGAH		5	39,883									IV
23	KAB. N. DUGA		8	50,910									IV
24	KAB. LANNY JAYA		10	164,288									IV
25	KAB. DOGIYAI		6	69,949									IV
26	KAB. PUNCAK		8	66,562									IV
27	KAB. YALIMO		5	46,570									IV
28	KAB. INTAN JAYA			49,985									IV
29	KAB. DEIYAI			39,845									IV

XXXIII	PAPUA BARAT Manokwari (PP No. 24/2007)	11	126	765,717				IV					
1	KAB. SORONG Sorong		16	70,664									IV
2	KAB. MANOKWARI Manokwar		29	169,676									IV
3	KAB. FAK FAK Fak Fak		9	46,239									IV
4	KAB. SORONG SELATAN Teminabuan		14	73,619									IV
5	KAB. RAJA AMPAT Waisai		13	38,795									IV
6	KAB. TELUK BENTUNI Bintun		26	28,716									IV
7	KAB. TELUK WONDAMA Rasiei		7	19,569									IV
8	KAB. KAIMANA Kaimana		7	32,355									IV
9	KOTA SORONG Sorong		5	247,656									IV
10	KAB. TAMBRAUW			7,295									IV
11	KAB. MAYBRAT			31,133									IV

**Keterangan :****1. Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Independen Pemilihan Provinsi**

Tipe Gedung Kantor	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	Luas Minimal Lahan Bangunan (m <sup>2</sup> )
I	1609	1166
II	1593	1156
III	1576	1146
IV	1559	1136

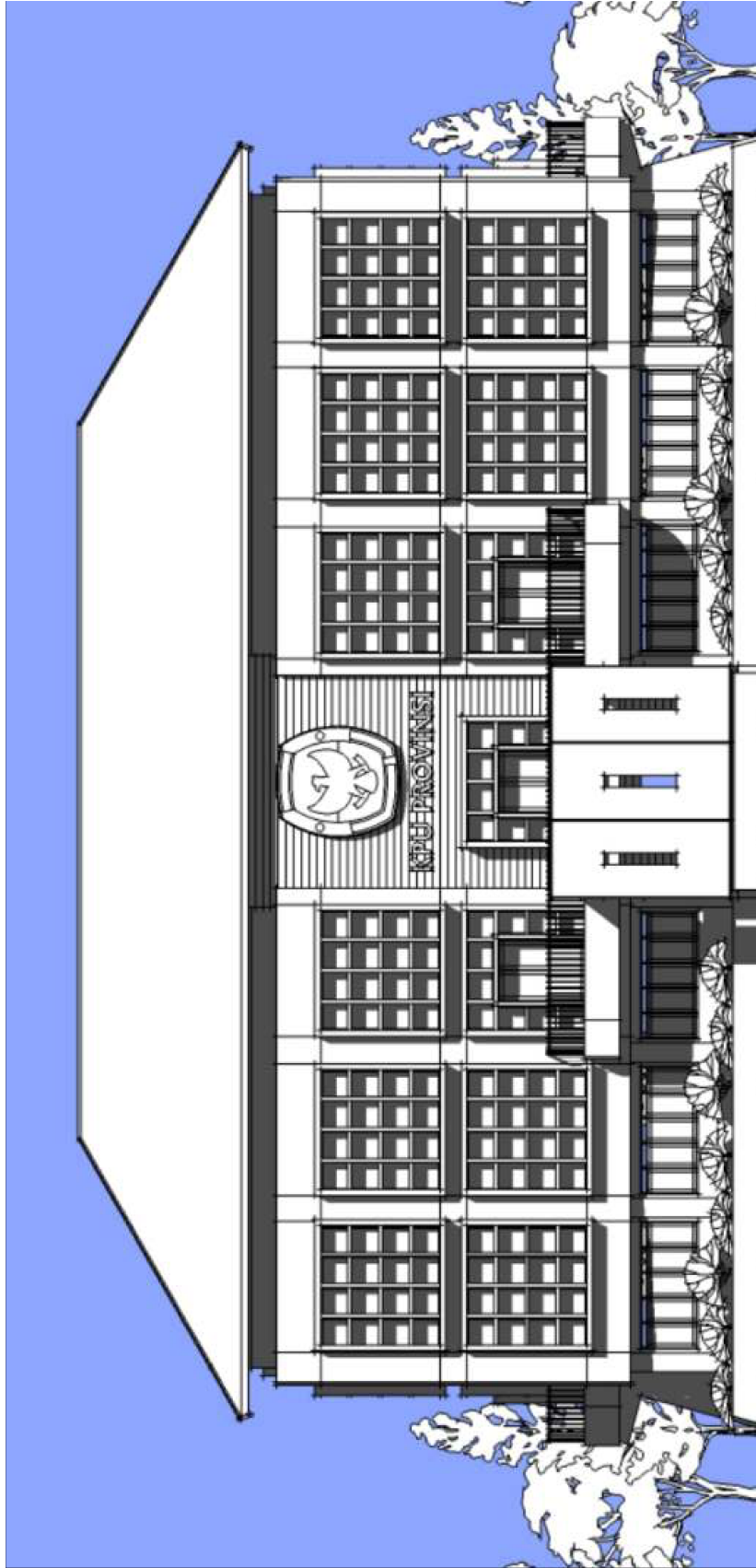
**2. Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota**

Tipe Gedung Kantor	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	Luas Minimal Lahan Bangunan (m <sup>2</sup> )
I	609	466
II	597	458
III	584	451
IV	572	443



**IDENTITAS BANGUNAN GEDUNG KPU PROVINSI, KIP PROVINSI, KPU  
KAB/KOTA DAN KIP KAB/KOTA**

---

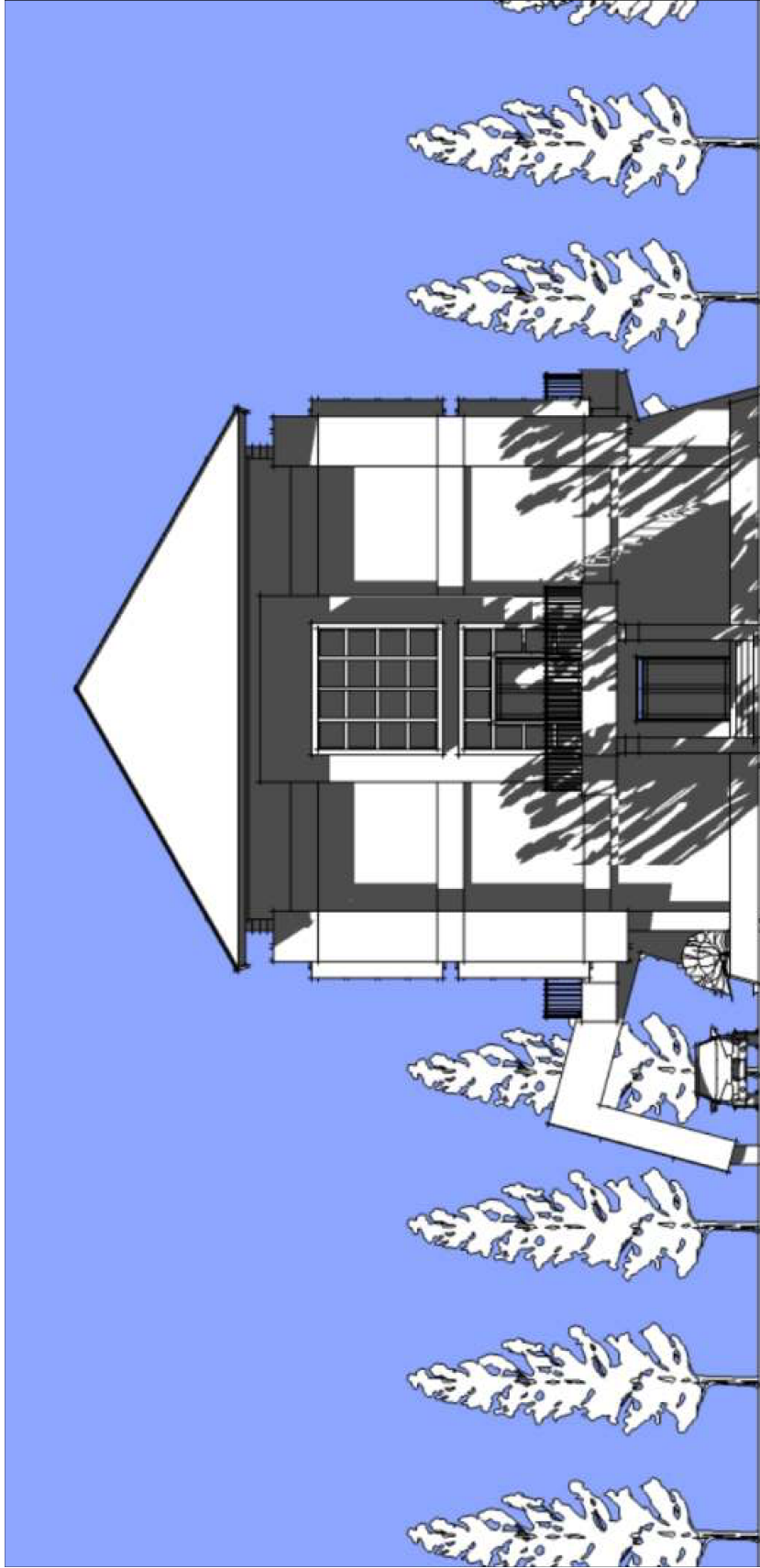


TAMPAK MUKA

---

**IDENTITAS BANGUNAN GEDUNG KPU PROVINSI, KIP PROVINSI, KPU  
KAB/KOTA DAN KIP KAB/KOTA**

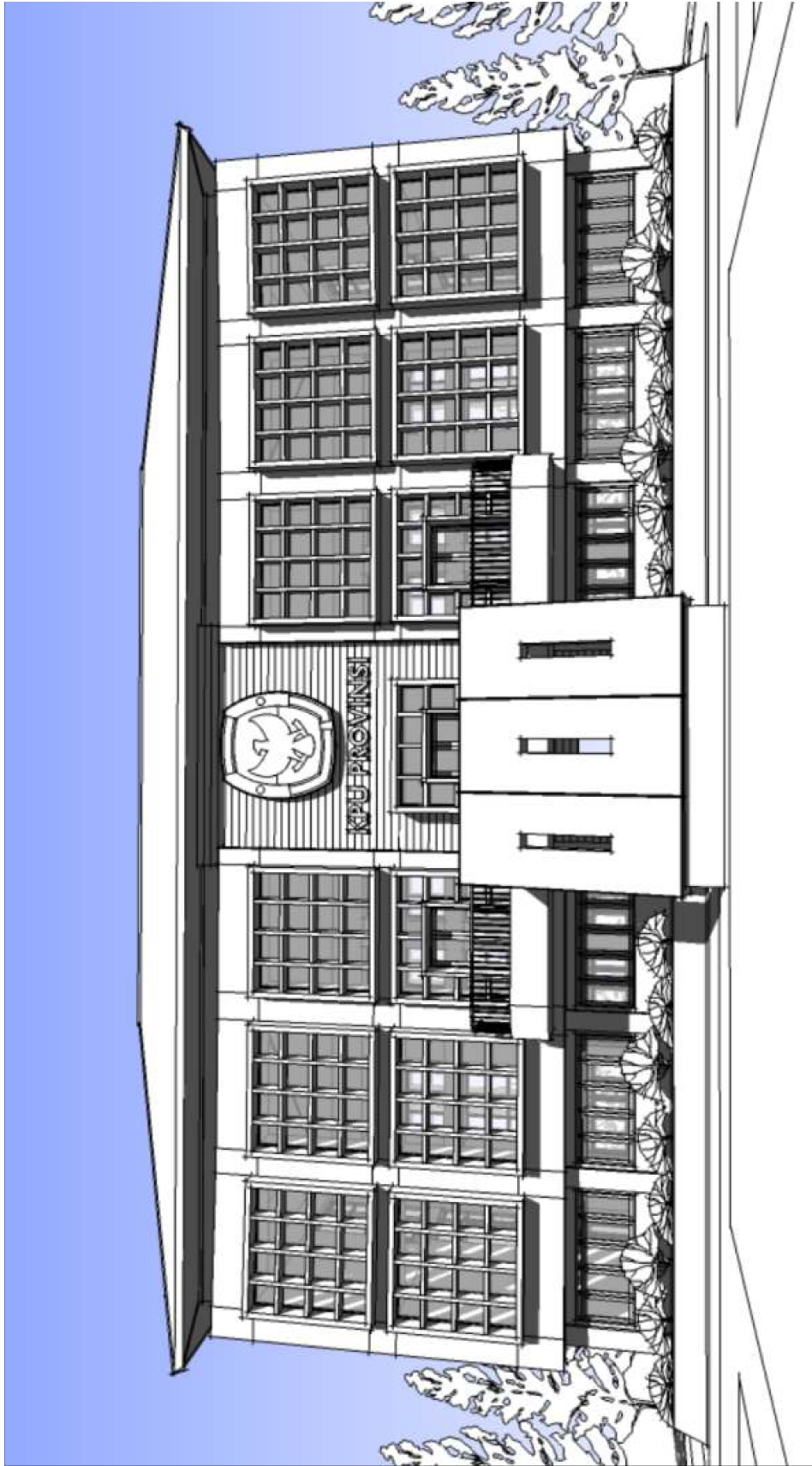
---



TAMPAK SAMPING

**IDENTITAS BANGUNAN GEDUNG KPU PROVINSI, KIP PROVINSI, KPU  
KAB/KOTA DAN KIP KAB/KOTA**

---



PERSPEKTIF MUKA

---

**IDENTITAS BANGUNAN GEDUNG KPU PROVINSI, KIP PROVINSI, KPU  
KAB/KOTA DAN KIP KAB/KOTA**

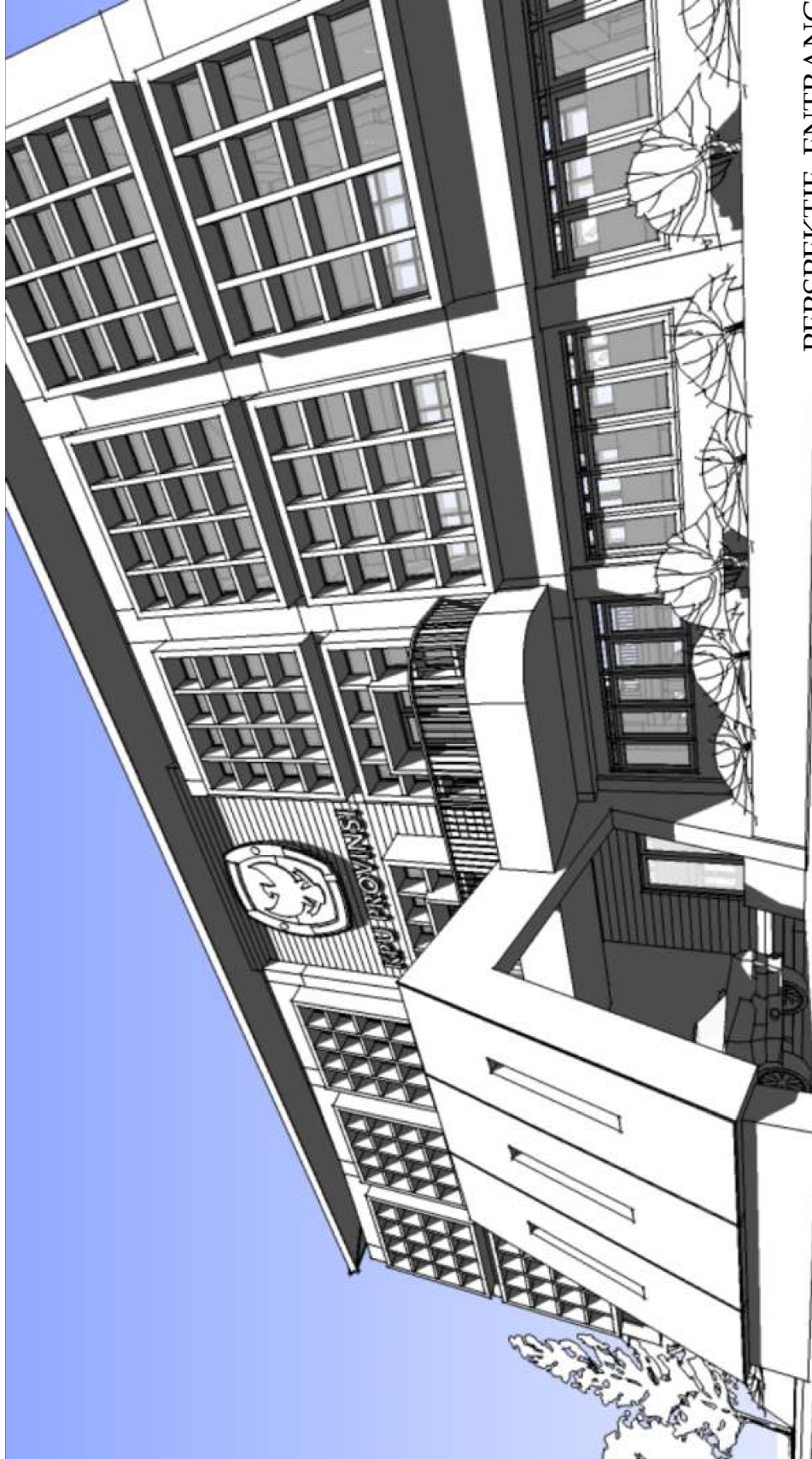
---



PERSPEKTIF MUKA POJOK

**IDENTITAS BANGUNAN GEDUNG KPU PROVINSI, KIP PROVINSI, KPU  
KAB/KOTA DAN KIP KAB/KOTA**

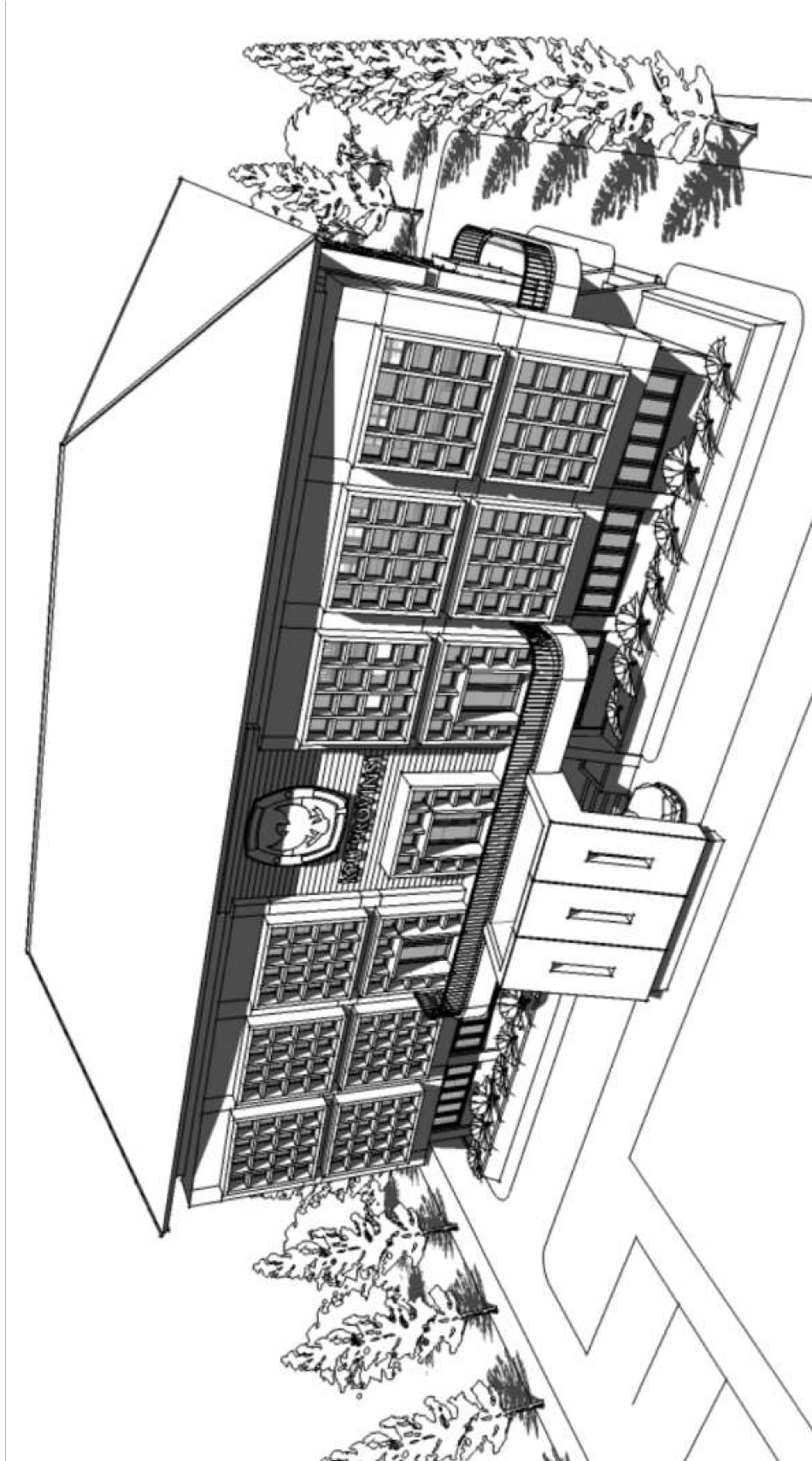
---



PERSPEKTIF ENTRANCE

**IDENTITAS BANGUNAN GEDUNG KPU PROVINSI, KIP PROVINSI, KPU  
KAB/KOTA DAN KIP KAB/KOTA**

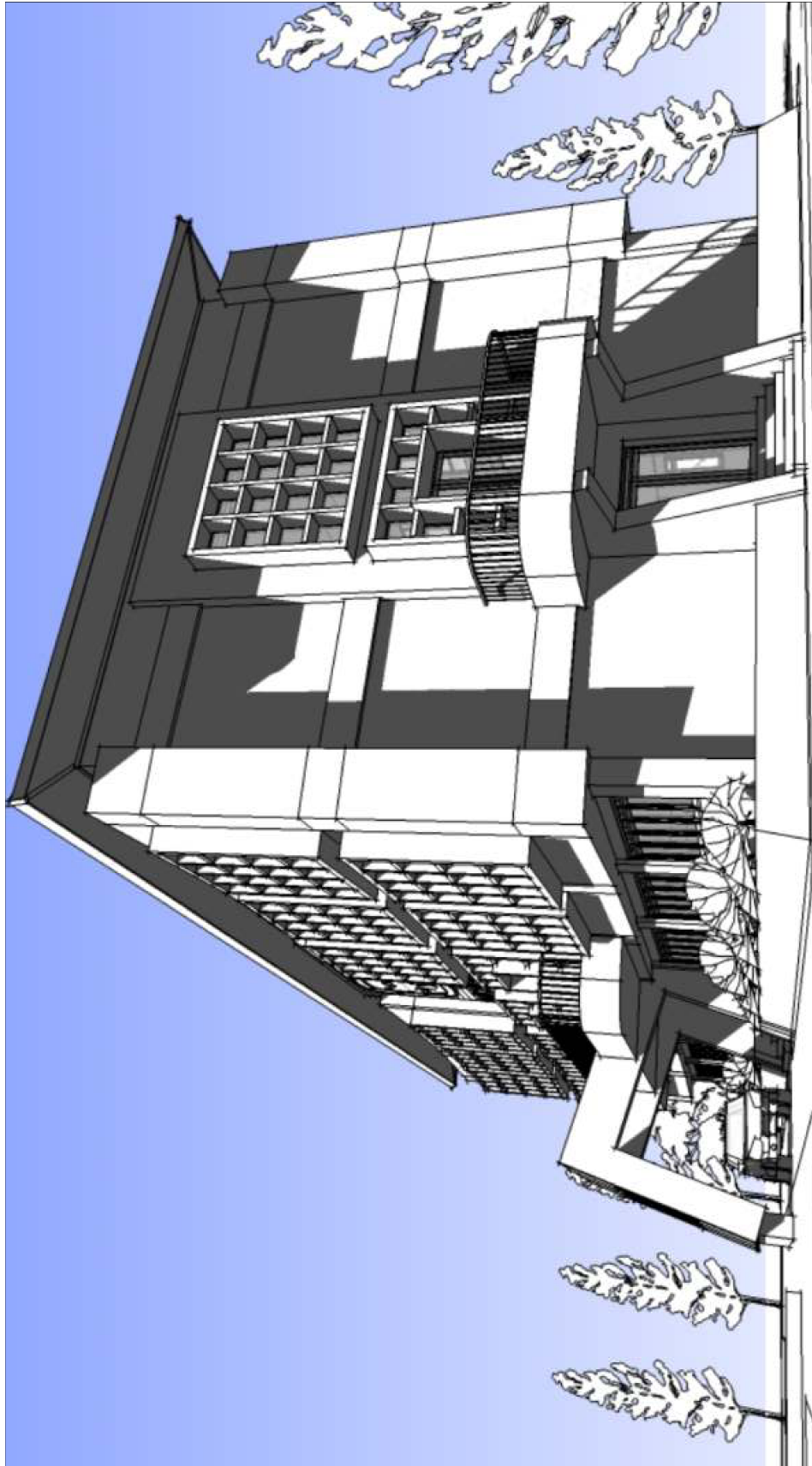
---



PERSPEKTIF UDARA

**IDENTITAS BANGUNAN GEDUNG KPU PROVINSI, KIP PROVINSI, KPU  
KAB/KOTA DAN KIP KAB/KOTA**

---



**PERSPEKTIF SISI GEDUNG**

---